KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Disampaikan Pada Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 14 April 2015

KERANGKA PAPARAN

- **Prioritas Pembangunan RPJMN 2015-2019**
- **Sasaran Makro RPJMN 2015-2019**
- **Sasaran Nasional RKP 2016**
- **Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur**
- **Penutup**
  - Rangkuman Permasalahan Pembangunan
  - Isu Strategis Pembangunan
  - Rekomendasi dan Saran

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

Kementerian PPN/ Bappenas

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

Kementerian PPN/ Bappenas

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman** pada seluruh WN
2. Membangun **tata kelola Pemerintahan** yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan **reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Kementerian PPN/ Bappenas

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Pendidikan
- Kesehatan
- Perumahan
- Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

- Antarkelompok Pendapatan
- Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

- Kepastian dan Penegakan Hukum
- Keamanan dan Ketertiban
- Politik & Demokrasi
- Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kementerian PPN/
Bappenas

SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019

SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019

Indikator	2014* (Baseline)	2015	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (metode lama)	69,4 (metode baru)	76,3 (metode lama)
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat[1]	0,55	-	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,40	0,36
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,7%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 ▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	43.403 40.785	- -	72.217
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	10,3	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,6%	4,0-5,0%

1 Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

**) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014*

*Perkiraan **Maret 2014

SASARAN NASIONAL RKP 2016

	Perkiraan 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*)	5,1	5,7	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp) *)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (US$ miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara **)						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,6	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,96***)	10,3	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Keterangan:

*) *Berdasarkan PDB tahun dasar 2010*

**) *Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015, penerimaan pajak tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB*

***) *Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.*

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kementerian PPN/
Bappenas

SASARAN RKP 2016 DAN
RANCANGAN TEMA RKP 2016

RANCANGAN TEMA RKP 2016

Kementerian PPN/ Bappenas

RKP 2015	RKP 2016	RKP 2017	RKP 2018	RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS	Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017	Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018	Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

RANCANGAN TEMA RKP 2016

Kementerian PPN/ Bappenas

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

- Salah satu permasalahan utama yang **menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur**, termasuk pasokan listrik.
- Pemenuhan **ketersediaan infrastruktur** merupakan salah satu **prasyarat utama** yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
- Pembangunan berkualitas adalah:
  - Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
  - Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan
- Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk **mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri** dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3)

PENDIDIKAN

Indikator	2014 (Baseline)	2016	2019
Pendidikan			
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)	8,46 (tahun)	8,8 (tahun)
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1%	96,8%	96,1 (%)
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	70%	84,6%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,87	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,59	0,60

Arah Kebijakan

Pendidikan

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas
3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (2/3)

Kementerian PPN/ Bappenas

KESEHATAN

No	Indikator	2014 (Baseline)	2016	2019
1	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	2,71	245
	2. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2013)	<0,5	<0,5
2	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	700	5.600
	2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	80	95
	3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015	2000	5.600

Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3)

Kementerian PPN/ Bappenas

PERUMAHAN, AIR MINUM, SANITASI

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2016	2019
Akses Air Minum Layak	70%	70% akses 4 K 7% Akses Dasar	100%
Akses Sanitasi Layak	60,9%	66,3% akses layak 11% akses dasar	100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha	38.431 Ha	0 Ha

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (1/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

KEDAULATAN PANGAN

INDIKATOR	2014 (baseline)	2016	2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan			
- Produksi perikanan (juta ton)	12,4	14,8	18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:			
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,89	9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	5,71	3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	304,75	304,75
- Pembangunan waduk)*	21	8 waduk baru dan rehabilitasi 3 Waduk	49

* Kumulatif 5 tahun

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; **Produk perikanan**: 40 juta ton (ikan dll)**

2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan.

3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras .

4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (2/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

KEDAULATAN ENERGI

INDIKATOR	2014 (baseline)	2016	2019*
Rasio elektrifikasi	81,5%	91,09%	96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	1.058	1.200KWh
Peningkatan Produksi SD Energi:			
- Minyak Bumi (ribu BM/hari)	818	880	700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.150	1.295
- Batubara (Juta Ton)	421	419	400
Penggunaan DN (DMO):			
- Gas bumi DN	53%	61%	64%
- Batubara DN	24%	26%	60%
Regasifikasi onshore (unit)	-	5	6
Pembangunan FSRU (unit)	2	2	3
Jaringan pipa gas (km)	11.960	15.330	17.960
Pembangunan SPBG (unit)	40	30	118
Jaringan gas kota (sambungan rumah)	200 ribu	312 ribu	1 jt
Pembangunan kilang baru (unit)	-	proses	1

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (3/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

MARITIM DAN KELAUTAN

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2016	2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim			
▪ Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	500 (tahap identifikasi pulau – pulau kecil)	17.466 (Selesai th 2017)
▪ Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	35 kali perundingan	9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	82%	87%
Membangun Konektivitas Nasional:			
▪ Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	--	--	24
▪ Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	48 (pembangunan/ penyelesaian pelabuhan baru	270
▪ Pembangunan kapal perintis	50 unit	69 unit	104 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
▪ Produksi hasil perikanan (juta ton)	22,4	29,51 juta ton	40-50
▪ Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	22 unit	24 unit
▪ Peningkatan luas kawasan	15,7 juta ha	17,1 juta ha	20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (4/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

PARIWISATA DAN INDUSTRI

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2016	2019
Pariwisata			
▪ Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 juta	13 juta	20 juta
▪ Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	263 juta	275 juta
▪ Devisa (triliun rupiah)	120	169	260
Industri			
Sasaran Pertumbuhan:			
▪ Industri (%)	4,7	6,9	8.6
▪ Kontribusi dalam PDB	20,7%	21%	21,6%
▪ Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar	-	-	9.000 unit*

* Kumulatif 5 tahun

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN (1/4)

PEMERATAAN

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)		
▪ Kepemilikan Jaminan Kesehatan	86%	100%
▪ Akses Pangan Bernutrisi	60%	100%
▪ Akses thd Pelayanan Keuangan	4,2%	25%
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)		
▪ Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan kerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianya sarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usaha mikro/kecil		
Peningkatan daya saing tenaga kerja		
▪ Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)		10 juta (rata-rata 2 juta/thn)
▪ Persentase tenaga kerja formal	40,5%	51,0%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
▪ Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
▪ Pekerja Informal	1,3 juta	3,5 juta
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja		
▪ Jumlah pelatihan ▪ Jumlah sertifikasi	1.921.283* 576.887*	3.552.950** 2.280.764**
▪ Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	30,0%	42,0%
▪ Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	5,0%	25,0%

SASARAN:

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 7,0%-8,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 4,0%-5,0% di tahun 2019.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas
   - Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas
   - Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi
   - Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial
2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
   - Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan dan perbaikan desain program: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KKS)
   - Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal
   - Penguatan kelembagaan sosial
3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar
   - Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar
   - Peningkatan jangkauan layanan dasar
   - Pengembangan dan penguatan sistem monev terkait penyediaan layanan dasar
4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
   - Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro
   - Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
   - Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha
   - Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN (2/4)

KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

Indikator	2014 (Baseline)	2016	2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan			
a. Penurunan desa tertinggal	--	1000	s.d. 5,000 desa tertinggal
b. Peningkatan desa mandiri	--	400	paling sedikit 2,000 desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan			
a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	--	10 (187 lokasi priorias)
b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	--	92 pulau kecil terluar/terdepan

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi.
3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.
4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.
5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber-dayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi
6. Penguatan Pemerintahan Desa
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.
8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN (3/4)

KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

Indikator	2014 (Baseline)	2016	2019
Pembangunan Daerah Tertinggal			
c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *)	7,02 %	7,24%
d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	15,42%	14,0%
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46**)	68,49**)	69,59**)
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa			
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa	7	--	14***)
b. Kawasan Industri	n.a.	--	14
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	--	4

*) rata-rata 2010-2014
**) Dengan perhitungan Metode Baru
***) di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA → (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN (4/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

Indikator	2014 (Baseline)	2016	2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan			
a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2	2+ 5(usulan baru)
b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	--	20 dioptimalkan perannya
c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	7 pusat pertumbuhan baru	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	2 Kota baru	10 Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.
3. Pembangunan Kota Hijau dan berketahanan iklim dan bencana.
4. Pengembangan Kota Cerdas dan Berdaya Saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal.
5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola pembangunan perkotaan.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kementerian PPN/
Bappenas

SASARAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
RPJMN 2015-2019

SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	5.4	6.5	7.2	7.3	7.9
Jawa Barat	5.5	6.6	7.1	7.8	7.7
Banten	4.9	5.6	6.4	6.8	7.7
Jawa Tengah	5.7	6.7	7.1	7.5	7.7
D.I Yogyakarta	5.3	5.9	6.1	6.4	6.5
Jawa Timur	6.2	6.6	7.1	7.3	7.9
Bali	7.5	7.3	7.8	8.3	8.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	3.4	3.2	3.0	2.7	2.5
Jawa Barat	8.9	8.2	7.6	6.9	6.3
Banten	5.3	4.9	4.5	4.1	3.7
Jawa Tengah	13.1	12.2	11.3	10.4	9.5
D.I Yogyakarta	13.8	12.8	11.8	10.9	9.9
Jawa Timur	12.0	11.2	10.4	9.6	8.7
Bali	4.0	3.7	3.5	3.2	2.9

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	9.3	9.1	8.8	8.5	8.3
Jawa Barat	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4
Banten	9.6	9.2	8.8	8.4	8.0
Jawa Tengah	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7
D.I Yogyakarta	**3.0**	**2.8**	**2.6**	**2.5**	**2.3**
Jawa Timur	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5
Bali	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Pertumbuhan PDRB
- Pertumbuhan PDRB per Kapita
- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Kemiskinan
- Kependudukan
- Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah
- Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha
- Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014

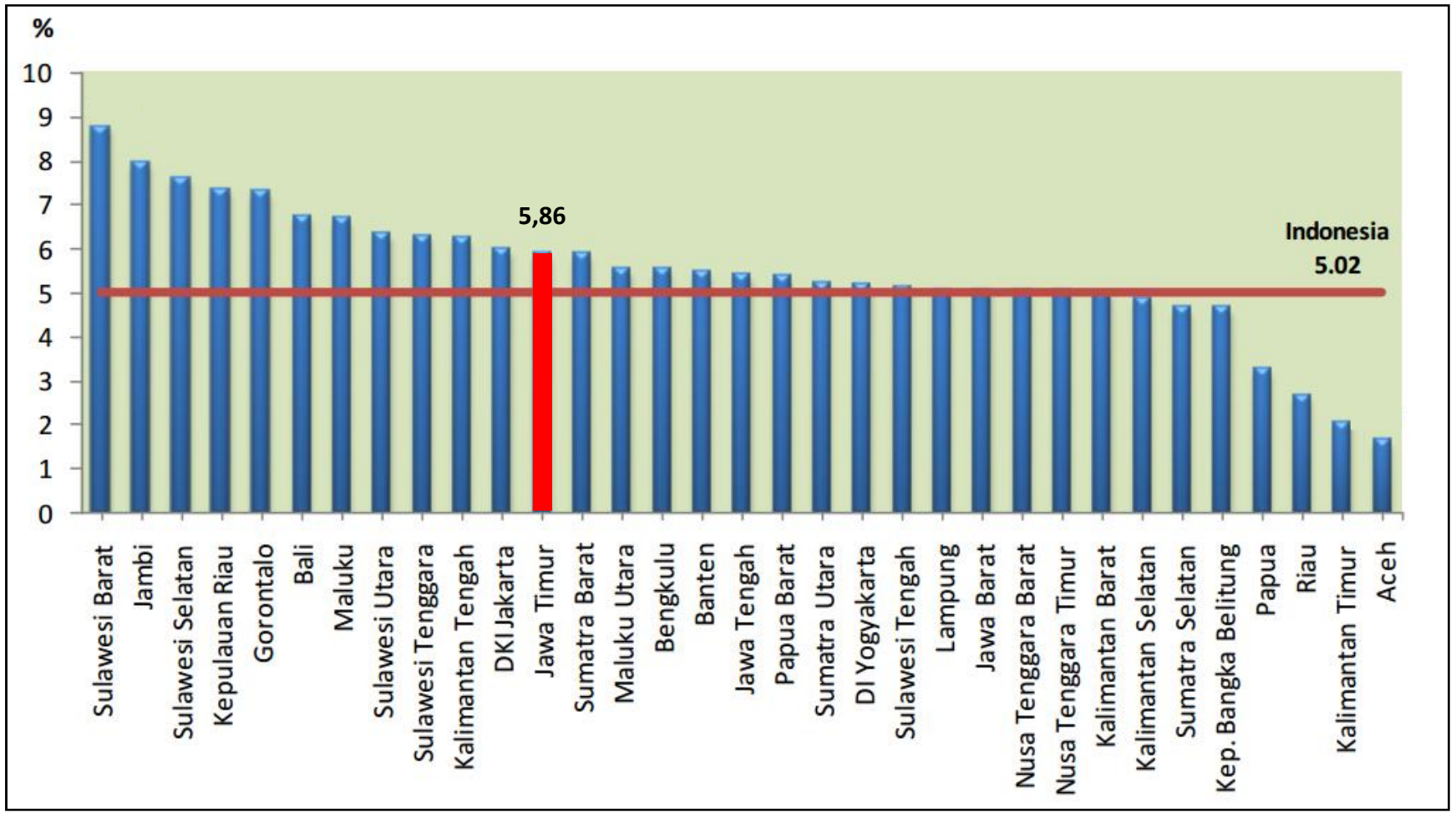

Sumber: BPS, 2015

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. JAWA TIMUR TERHADAP PDRB NASIONAL

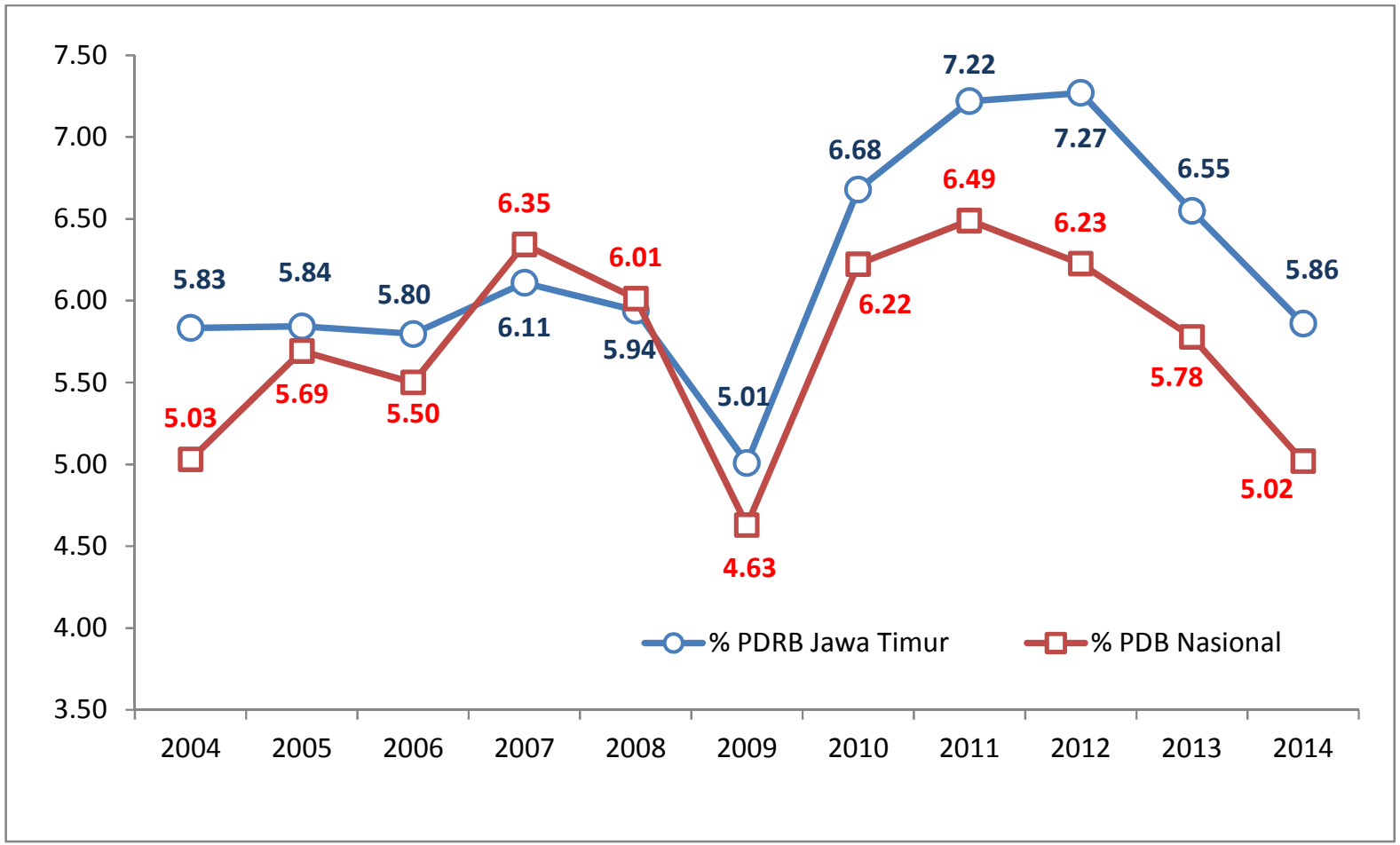

Sumber: BPS

PDRB PER KAPITA PROV. JAWA TIMUR TERHADAP NASIONAL

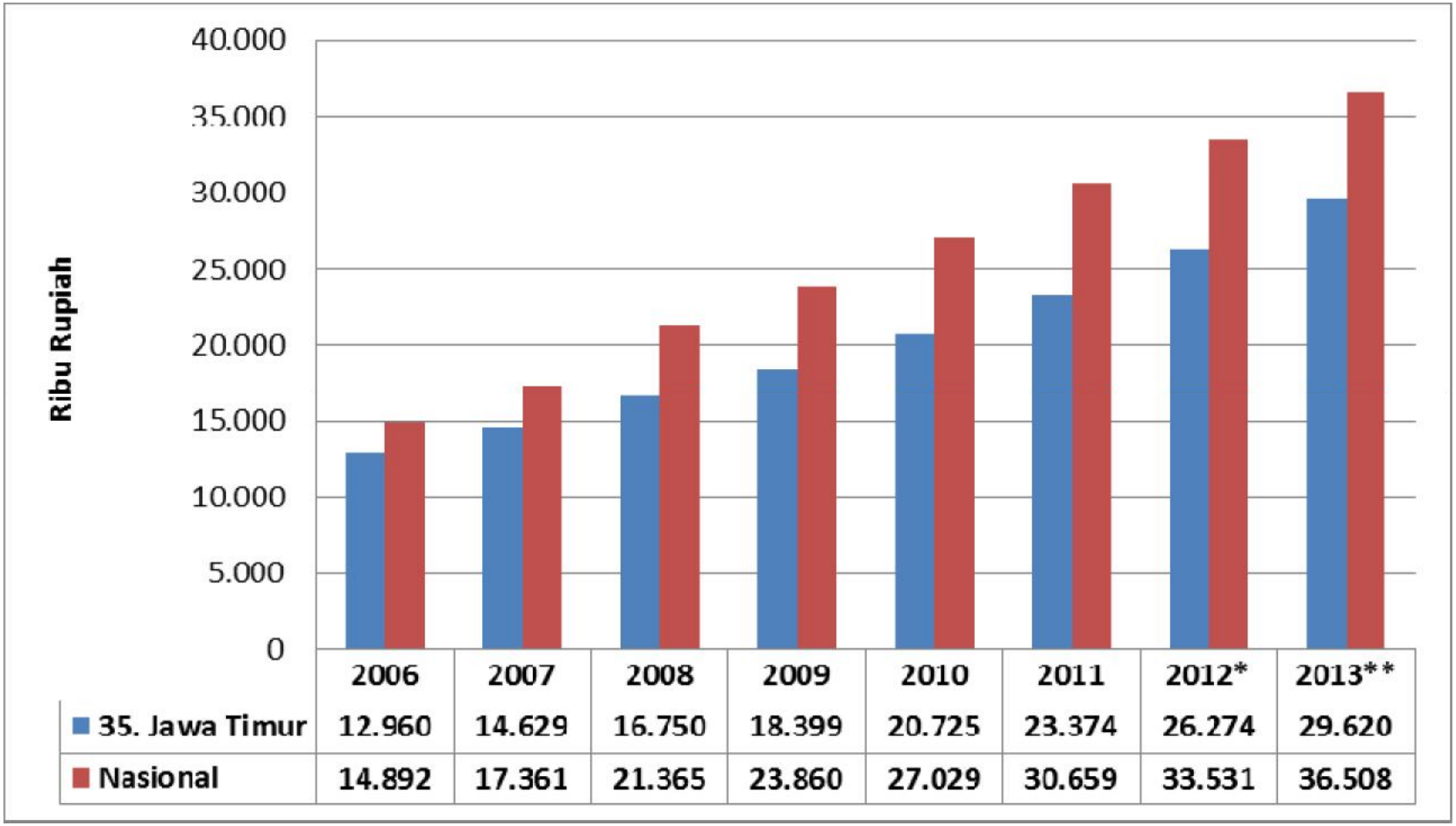

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
35. Jawa Timur	12.960	14.629	16.750	18.399	20.725	23.374	26.274	29.620
Nasional	14.892	17.361	21.365	23.860	27.029	30.659	33.531	36.508

Pencapaian PDRB per kapita Jawa Timur dari 2006 s.d 2013 selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional

Sumber: BPS

PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) JAWA TIMUR TERHADAP PROVINSI LAIN

(Agustus 2014)

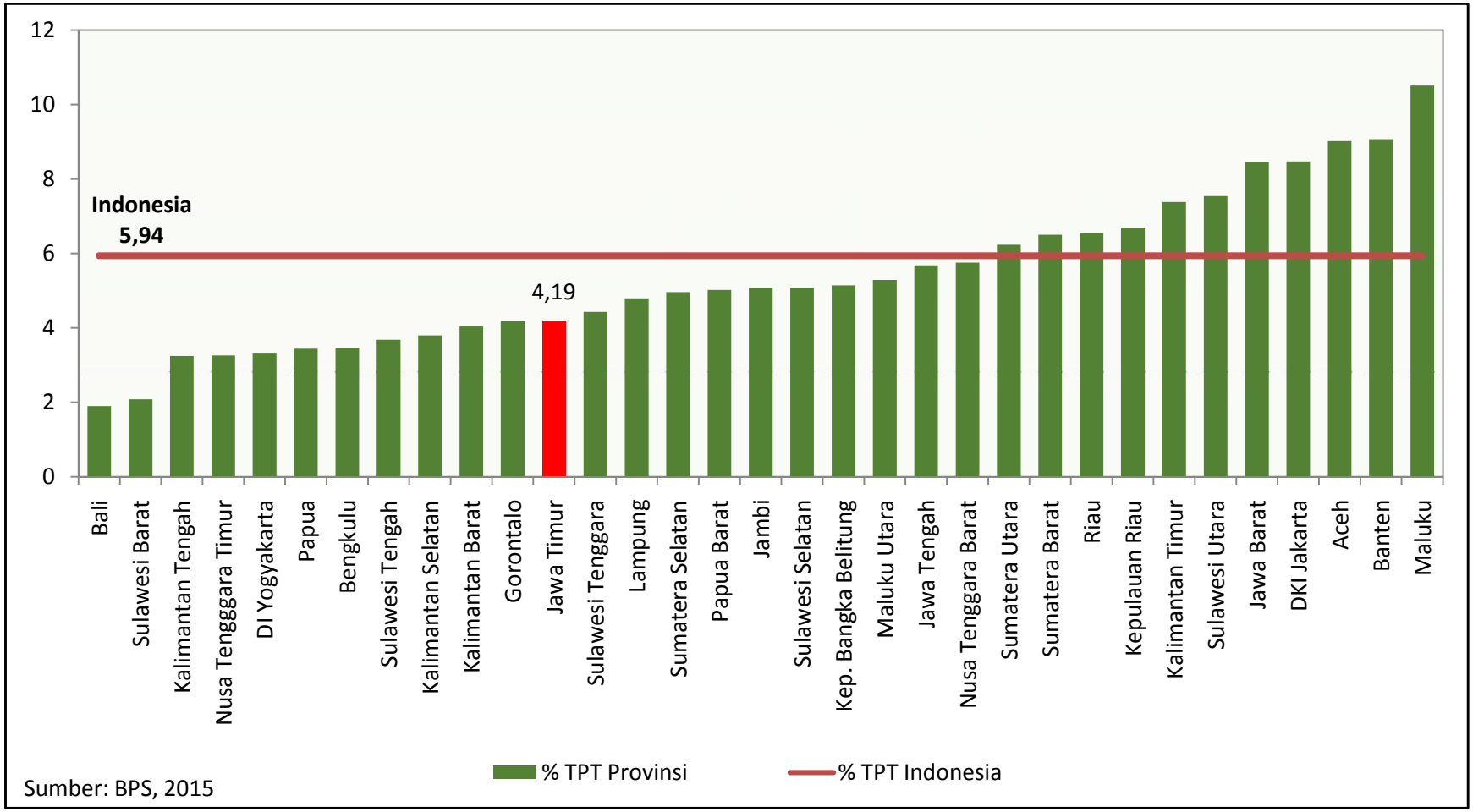

Sumber: BPS, 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 2014 sudah berada di bawah Nasional

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP NASIONAL

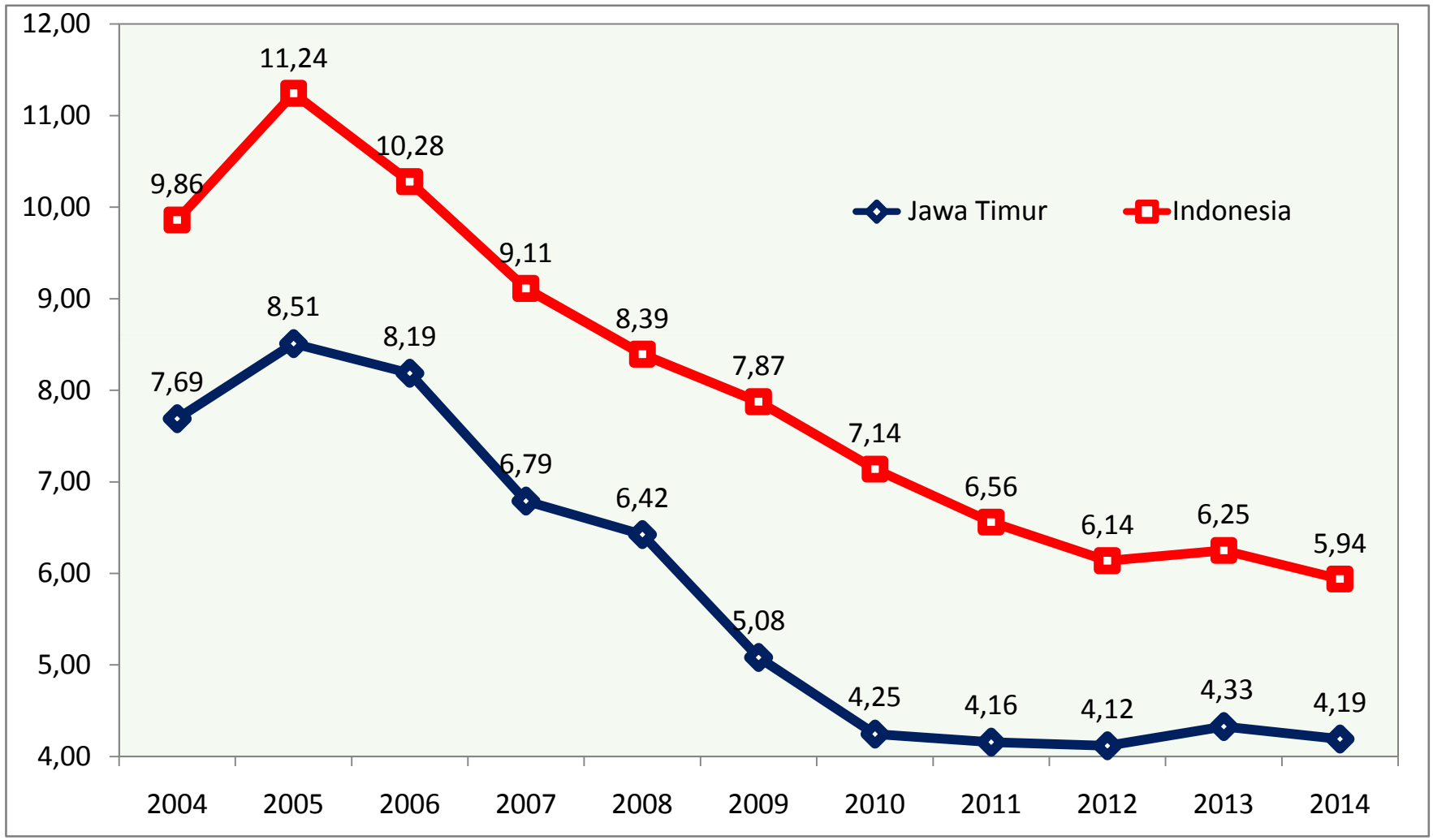

Sumber: BPS

PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. JAWA TIMUR TERHADAP PROVINSI LAIN

(September 2014)

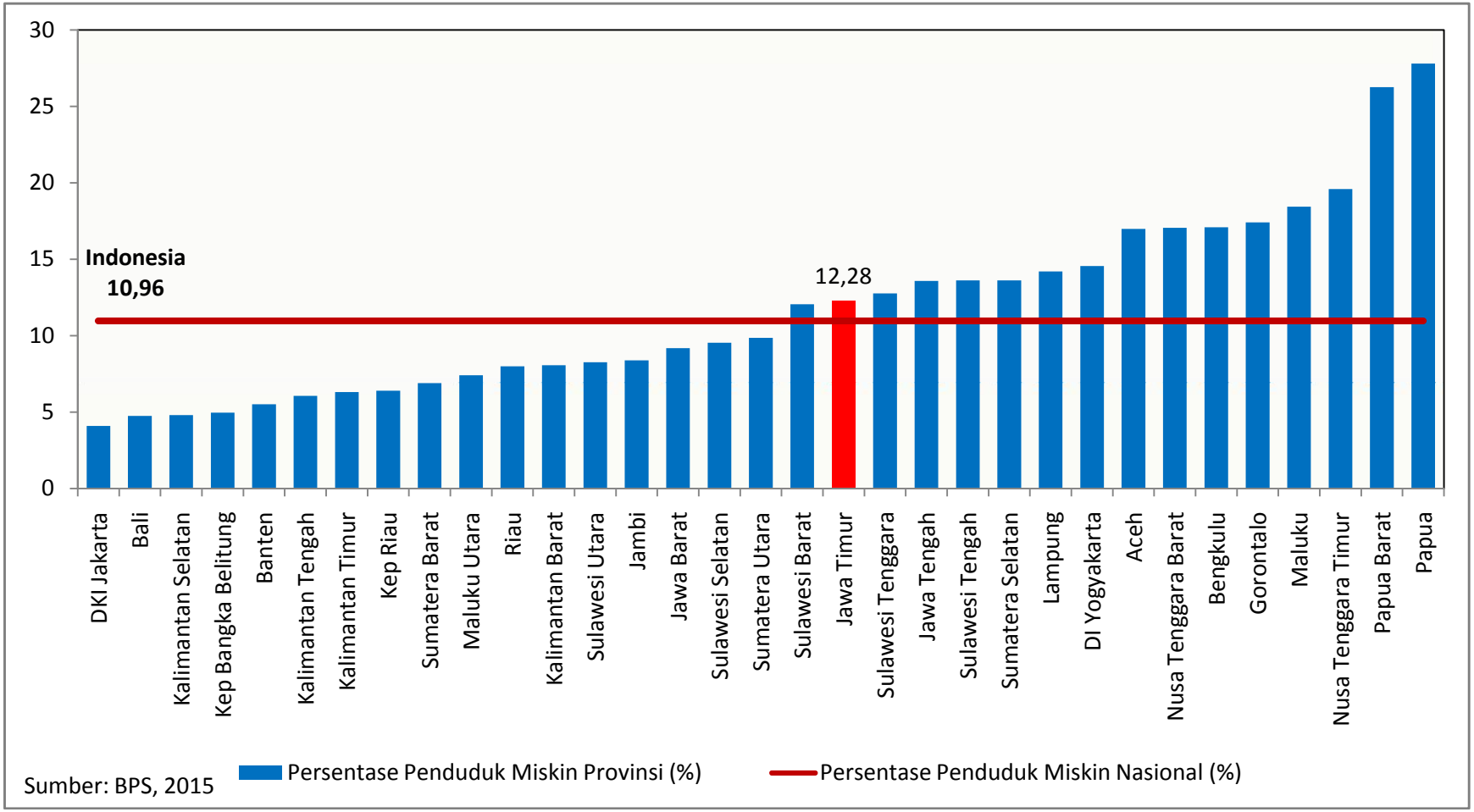

Sumber: BPS, 2015

Tingkat kemiskinan Jawa Timur 2014 masih berada di atas rata-rata Nasional

KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP NASIONAL

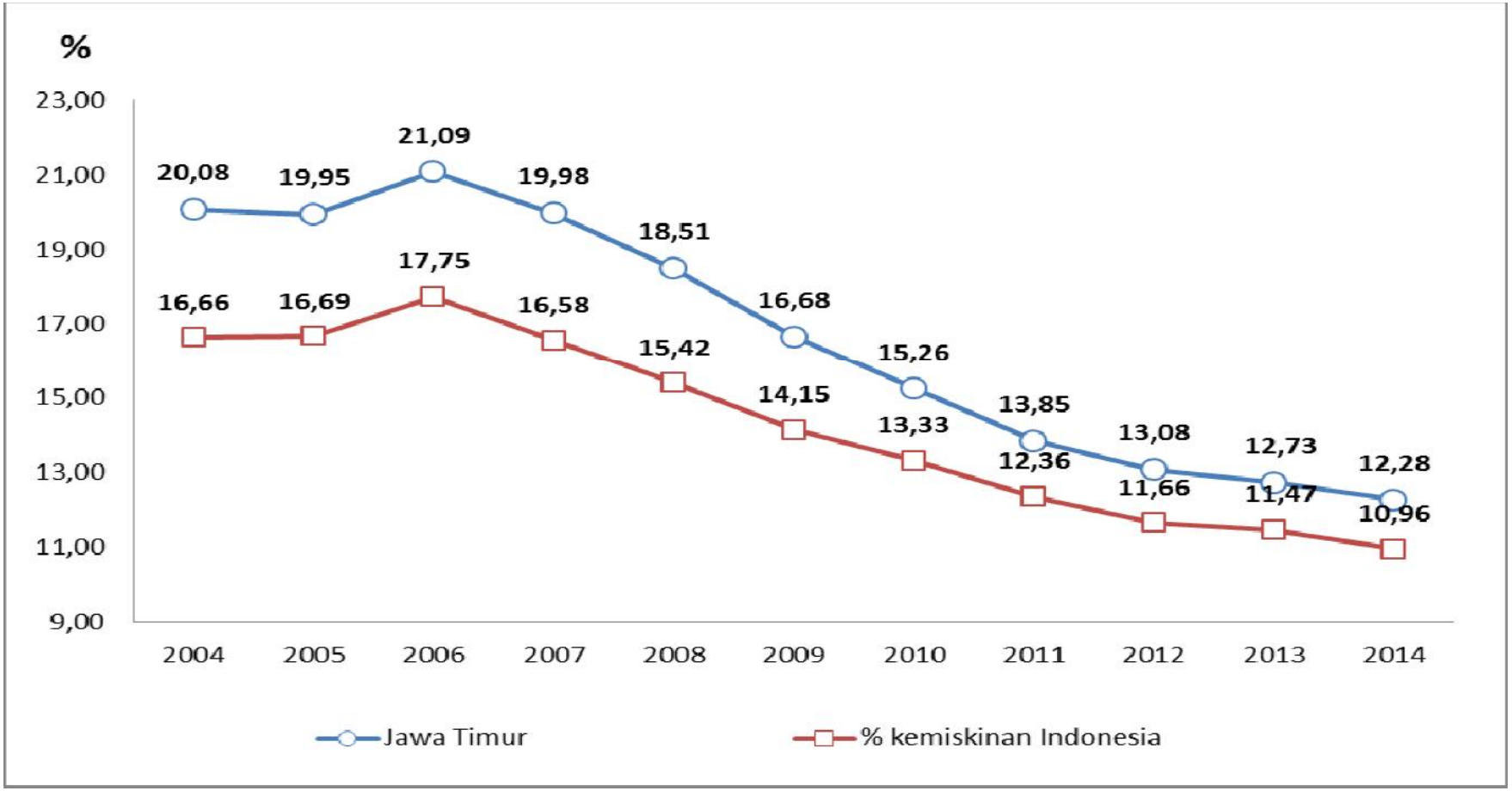

Tingkat kemiskinan Jawa Timur dari 2004 s.d 2014
selalu berada di atas tingkat kemiskinan Nasional

Sumber: BPS

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Provinsi (2000-2010)

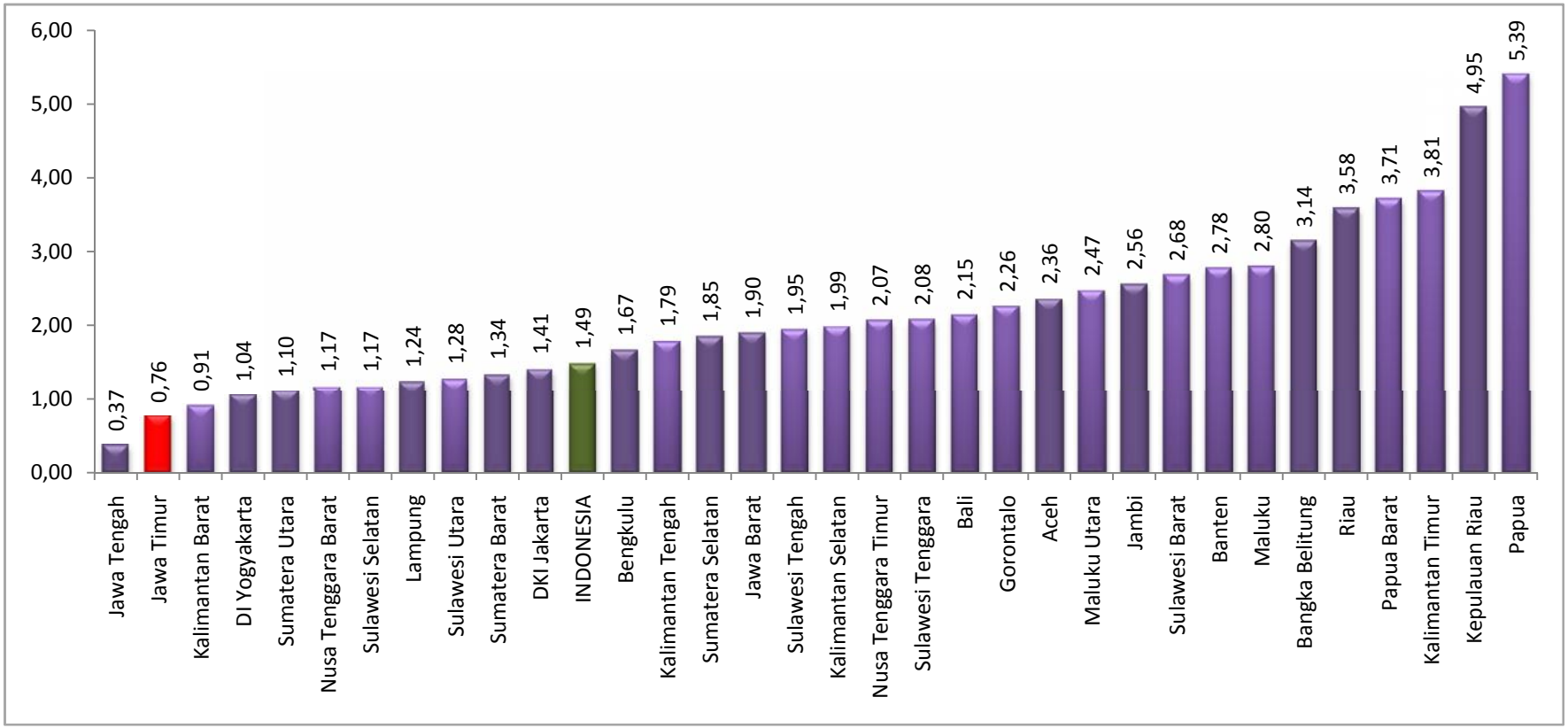

- Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur telah berada dibawah rata-rata nasional dan menempati posisi kedua terendah dari seluruh provinsi (0,76%)
- Namun demikian, angka tersebut meningkat sedikit dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk periode 1990-2000 (0,70%)

Angka Fertilitas Total (TFR) Menurut Provinsi (2012)

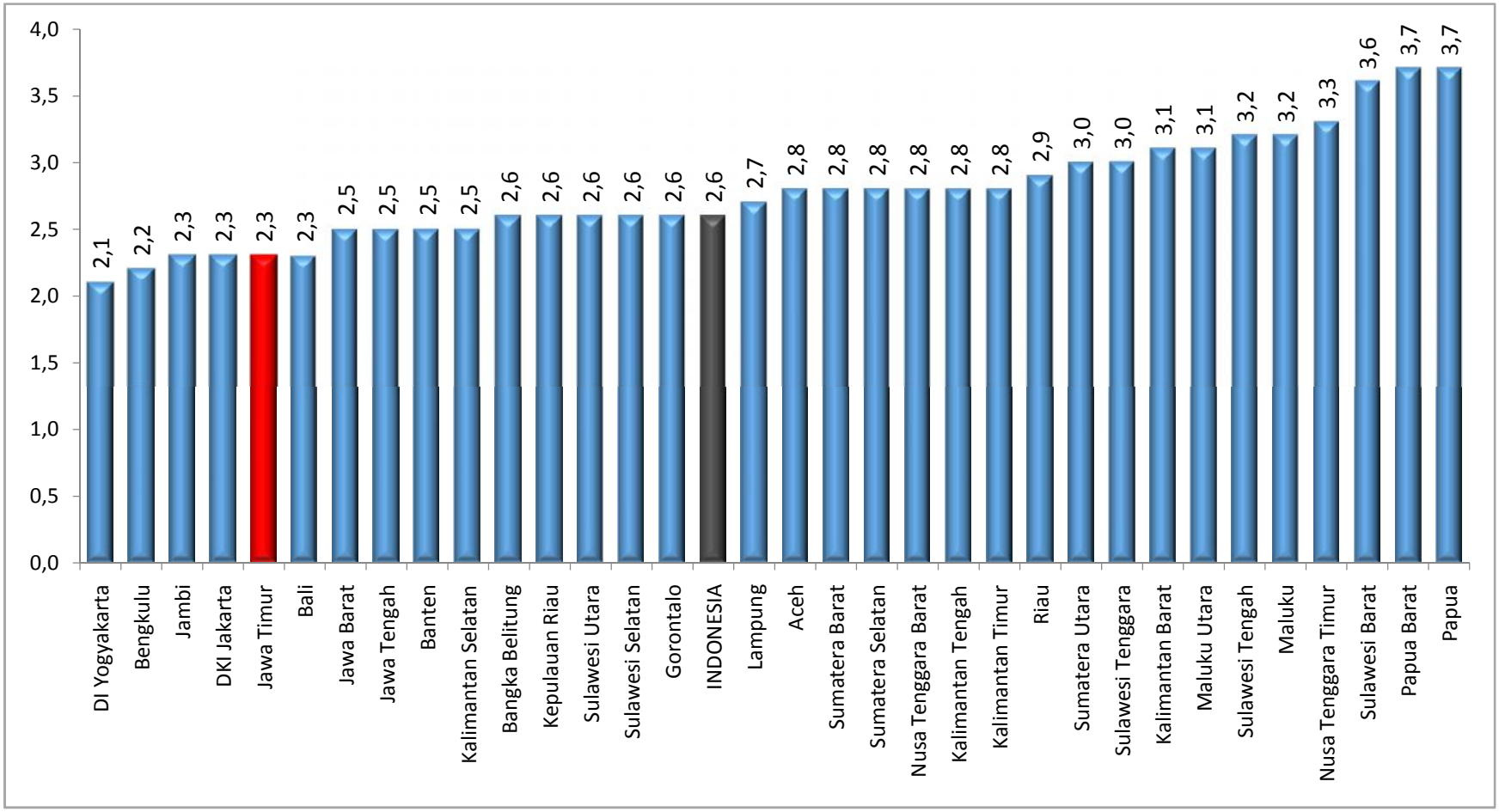

Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur s/d tahun 2010 dan proyeksinya s/d tahun 2035

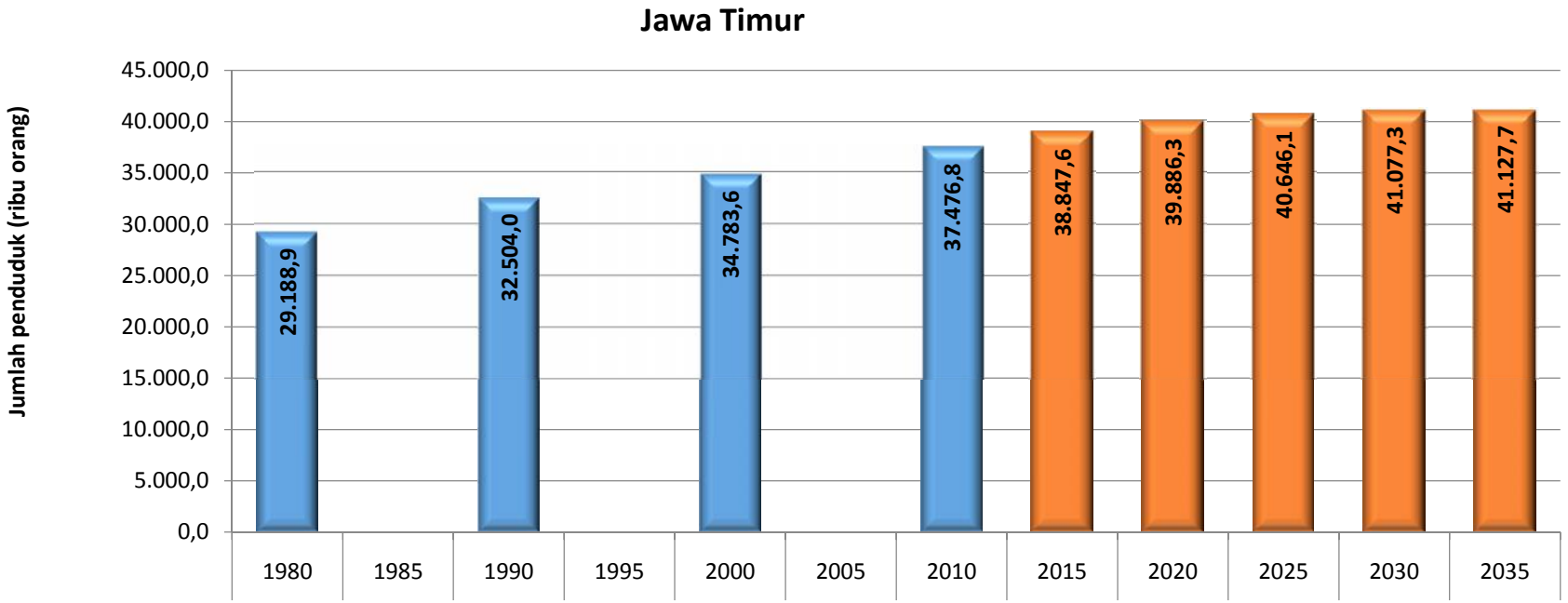

- Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Jatim meningkat 8,3 juta dan dan diproyeksikan meningkat sebanyak 3,7 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan
- Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan
  pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi

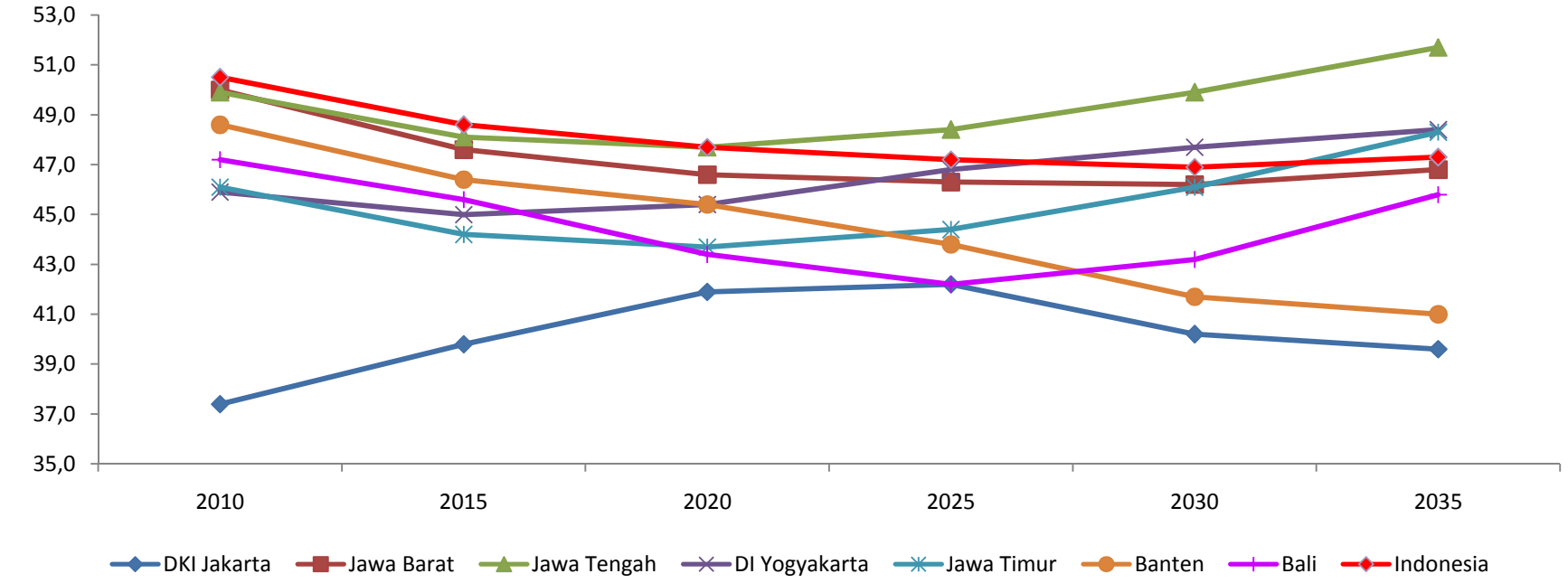

- Saat ini Provinsi Jatim telah memasuki periode dimana rasio ketergantungan telah mencapai angka dibawah 50%. Periode ini menjadi peluang untuk meraih bonus demografi, yaitu *tambahan bersih* pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh **meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.**
- Rasio ketergantungan dibawah 50% ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2035 dan mencapai titik rendah pada 43,7 di tahun 2020. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan TFR.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROV. JAWA TIMUR TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2013

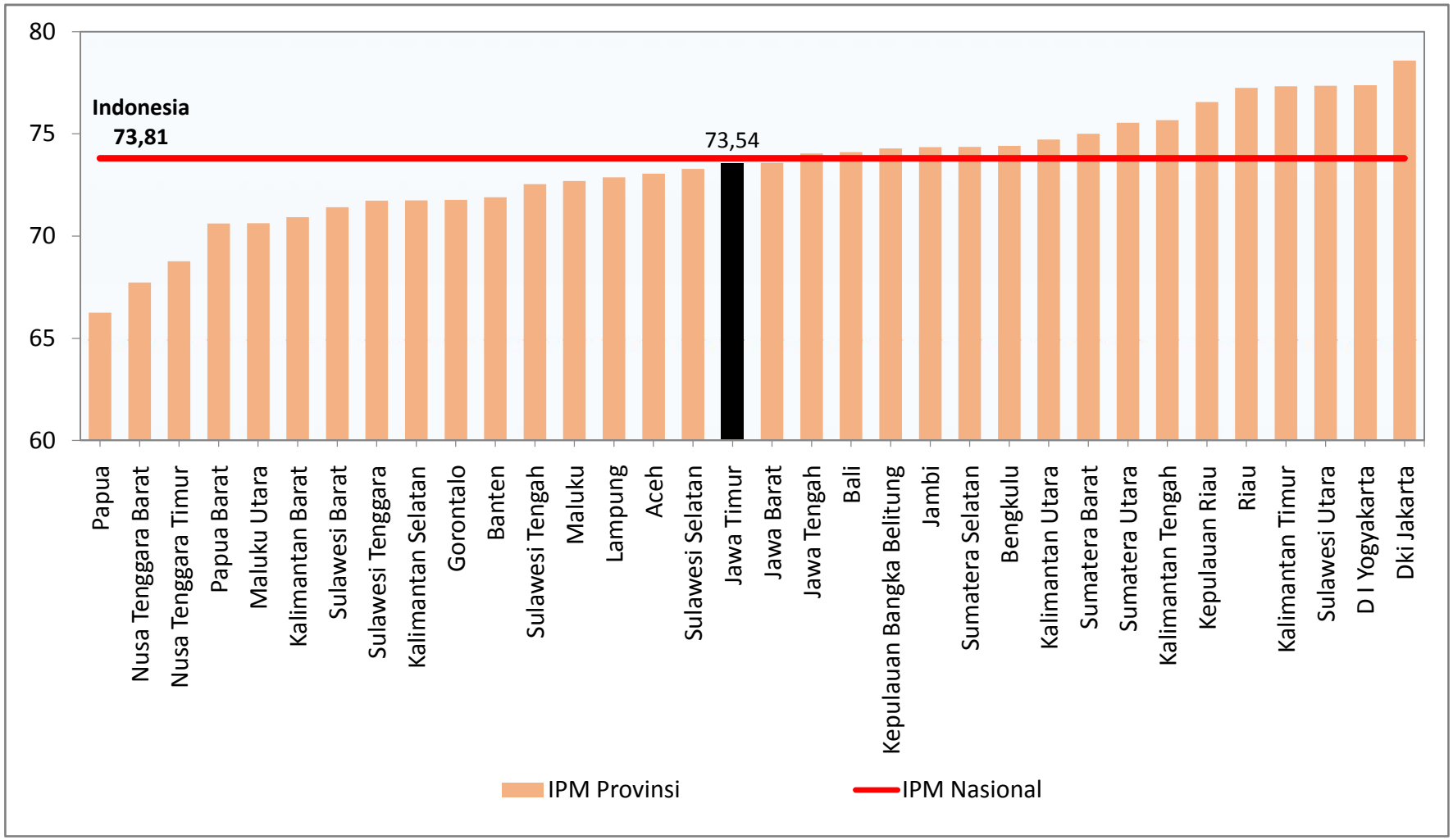

Sumber: BPS, 2015

PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP IPM NASIONAL, 2009 – 2013

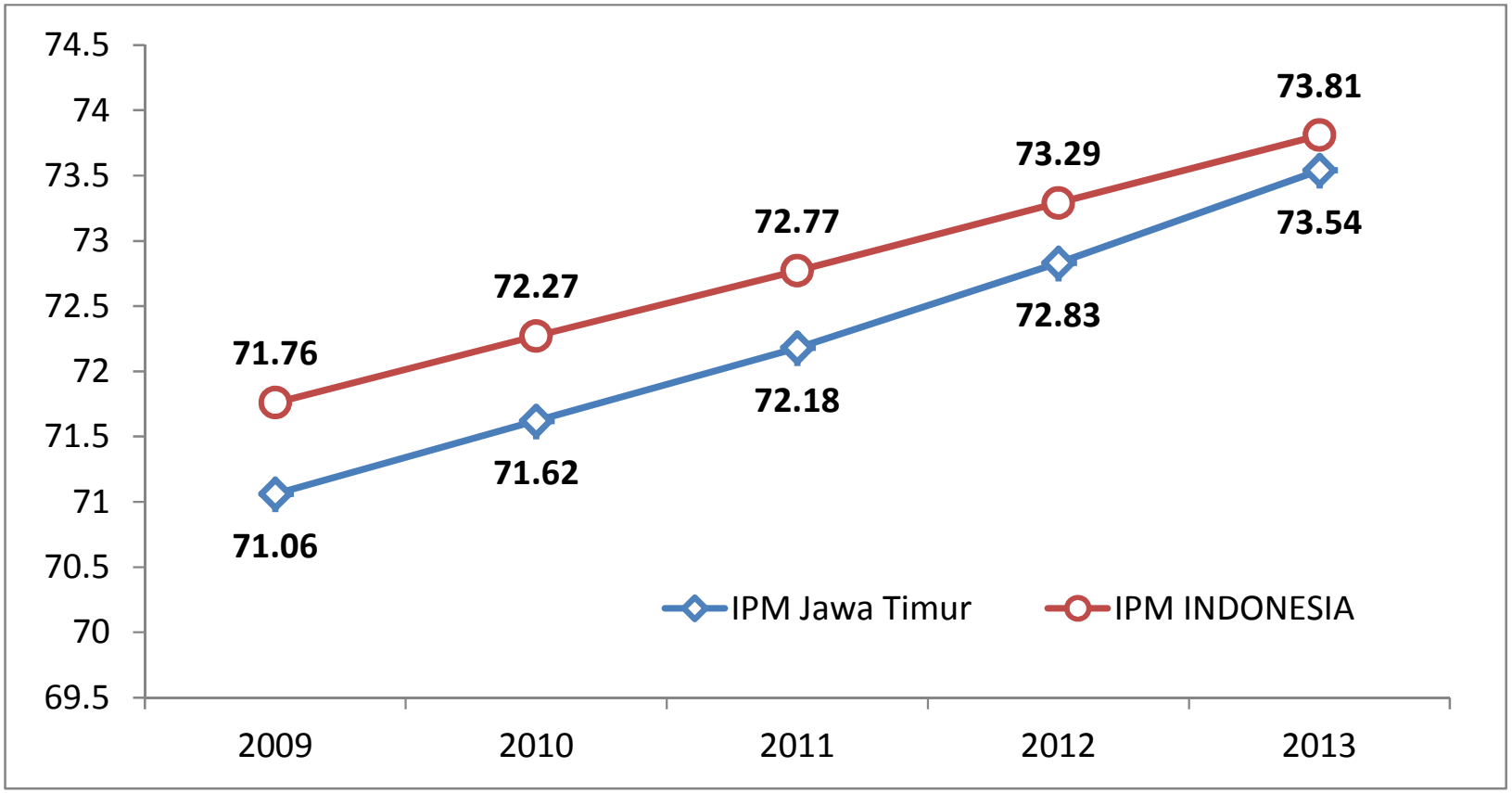

Sumber: BPS, 2015

RASIO GINI PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PROVINSI LAIN, 2013

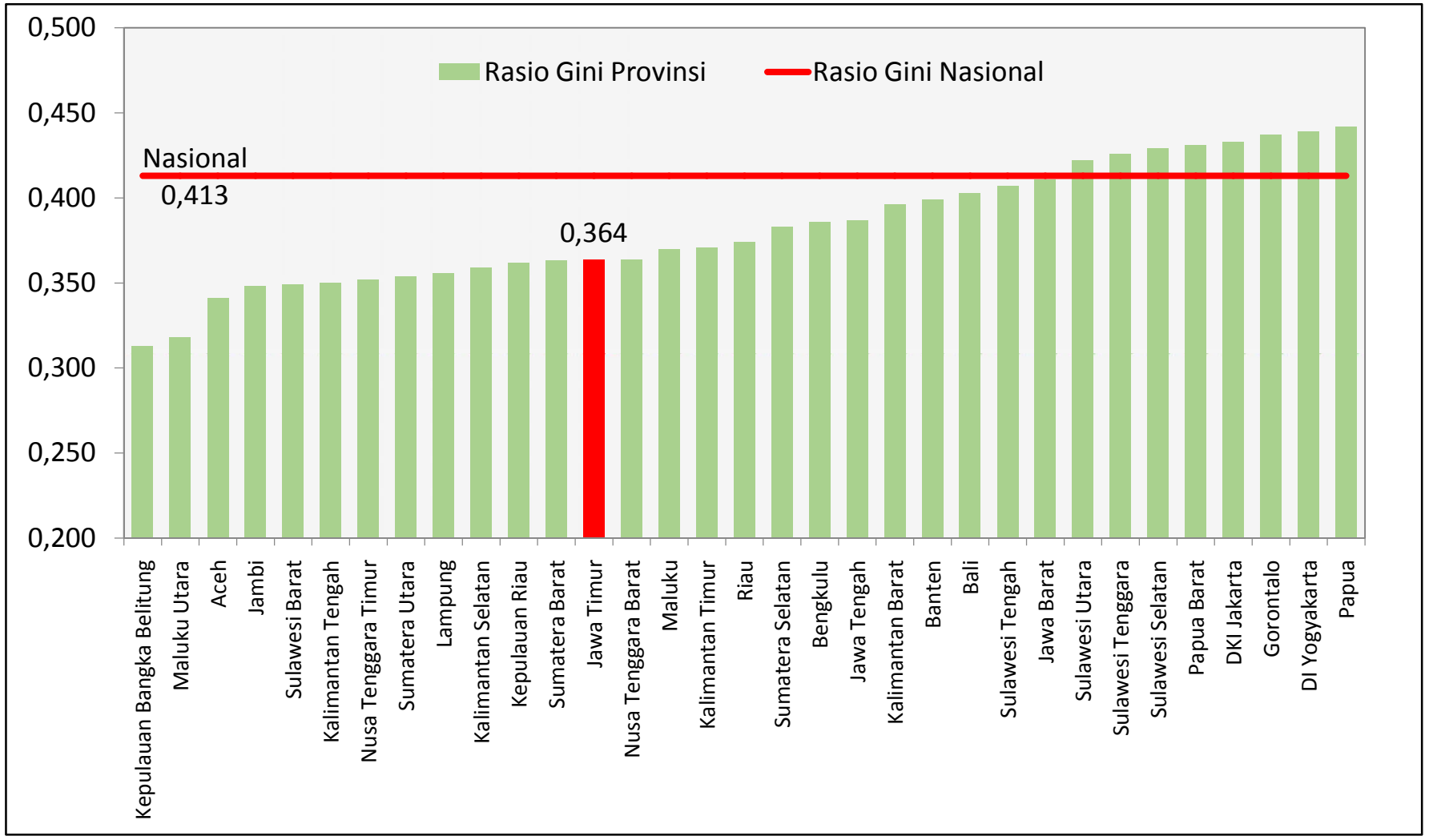

Sumber: BPS

RASIO GINI PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP NASIONAL

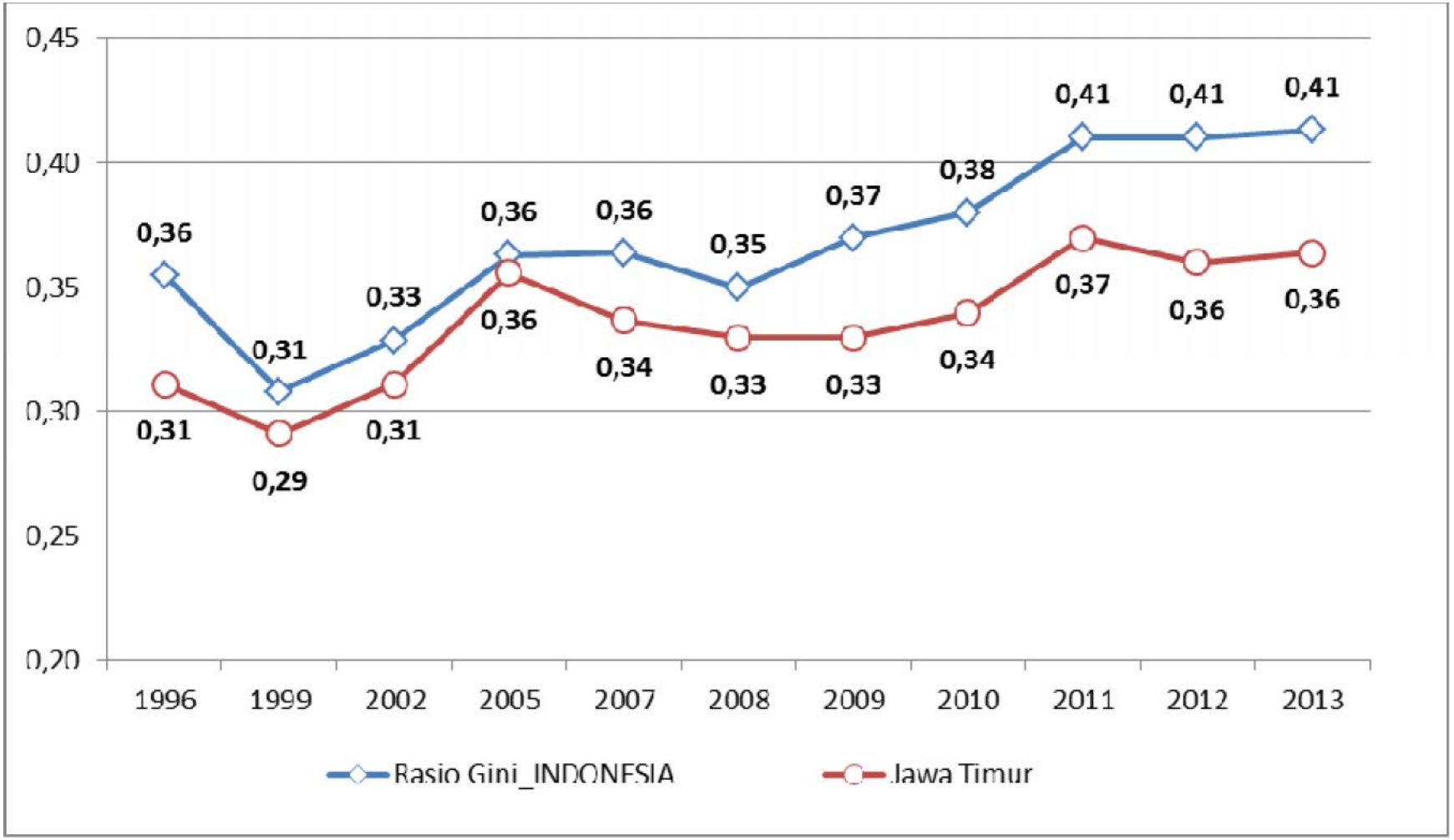

Sumber: BPS

Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

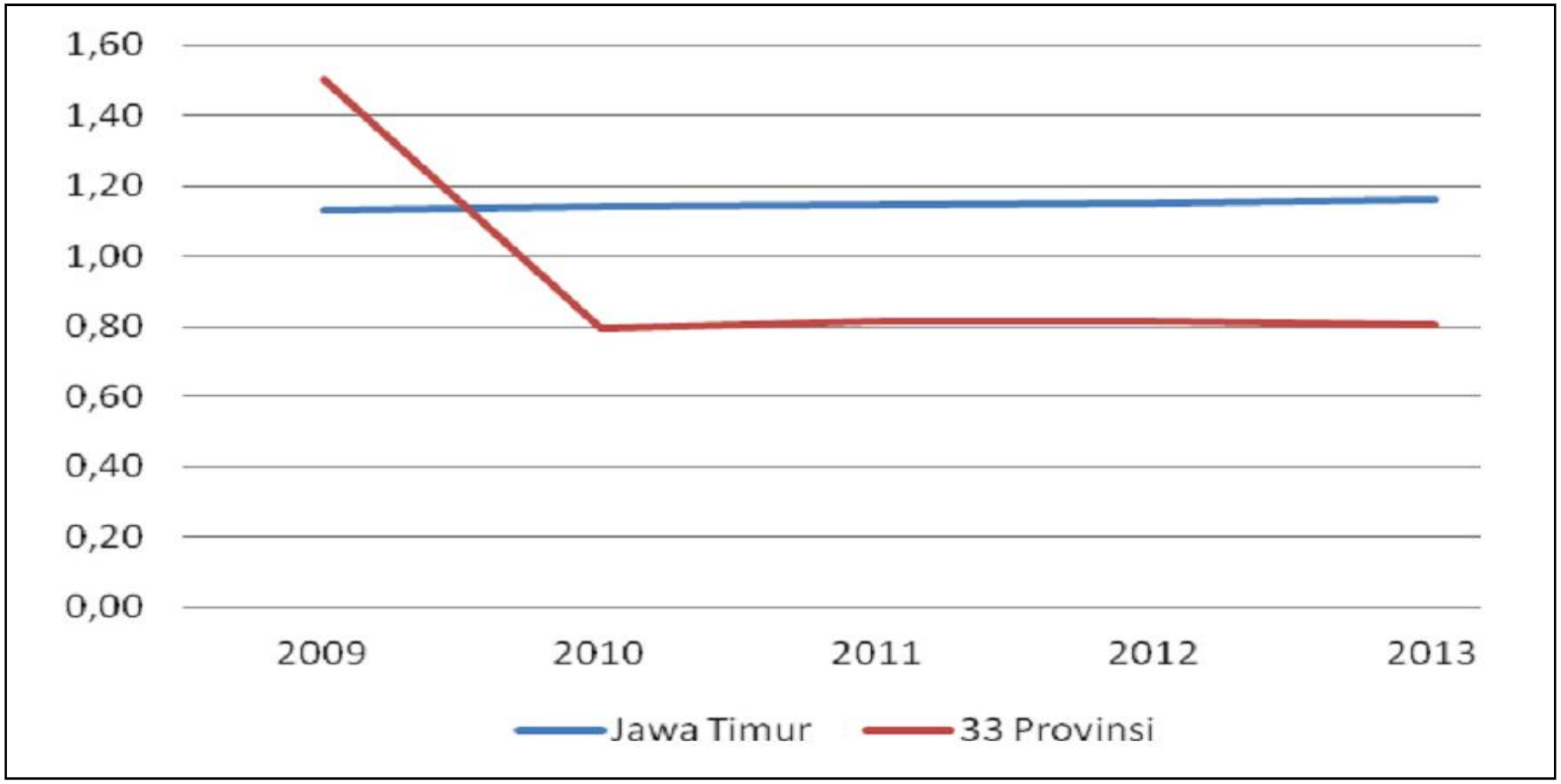

Sumber: BPS

Nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi dan dalam 4 tahun terakhir berada di atas nasional dengan kecenderungan semakin meningkat.

KONTRIBUSI PDRB PROVINSI DI PULAU JAWA TERHADAP PDRB NASIONAL

(ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2003-2013)

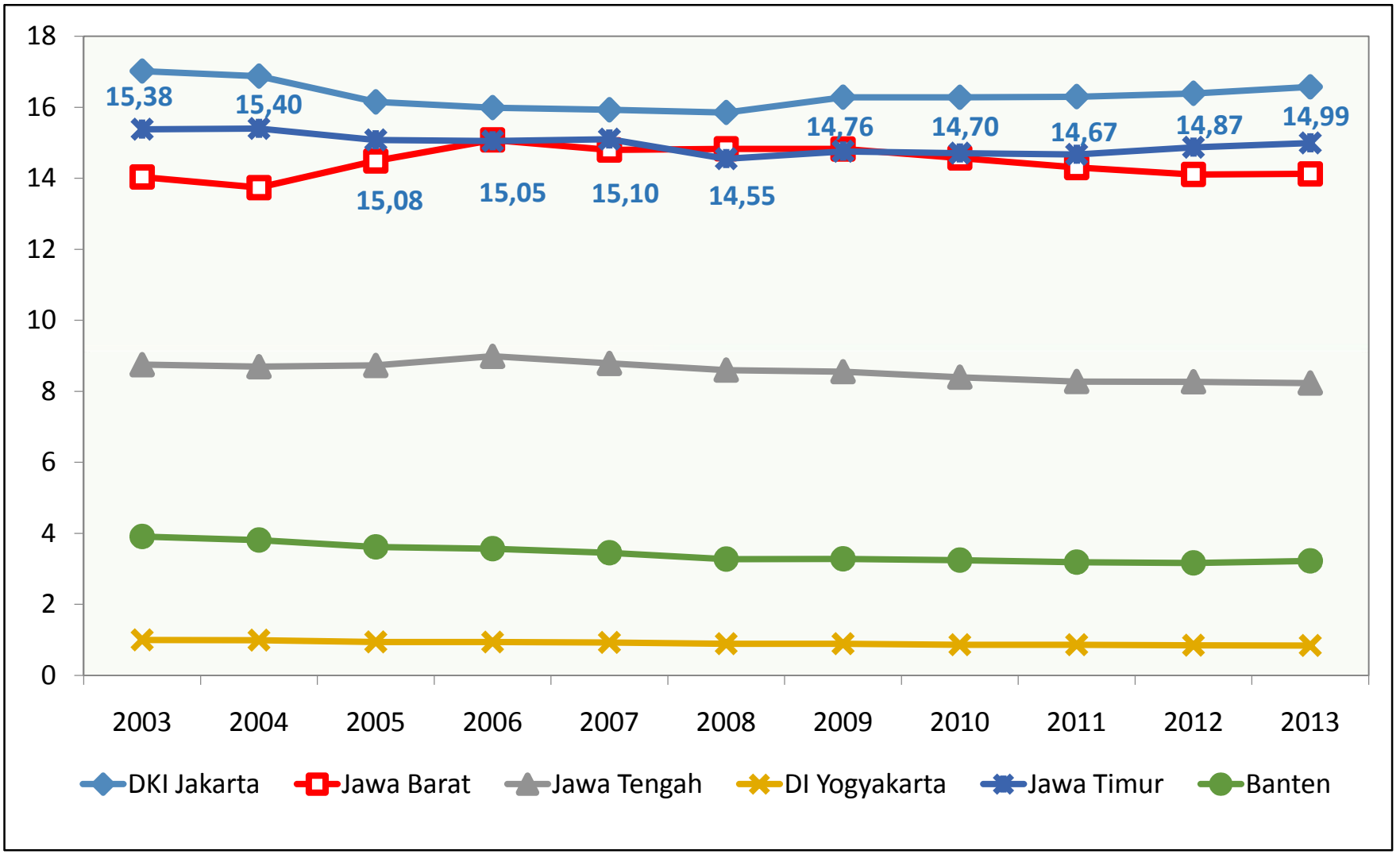

Sumber: BPS

PERSENTASE NILAI PDRB KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

(ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2013)

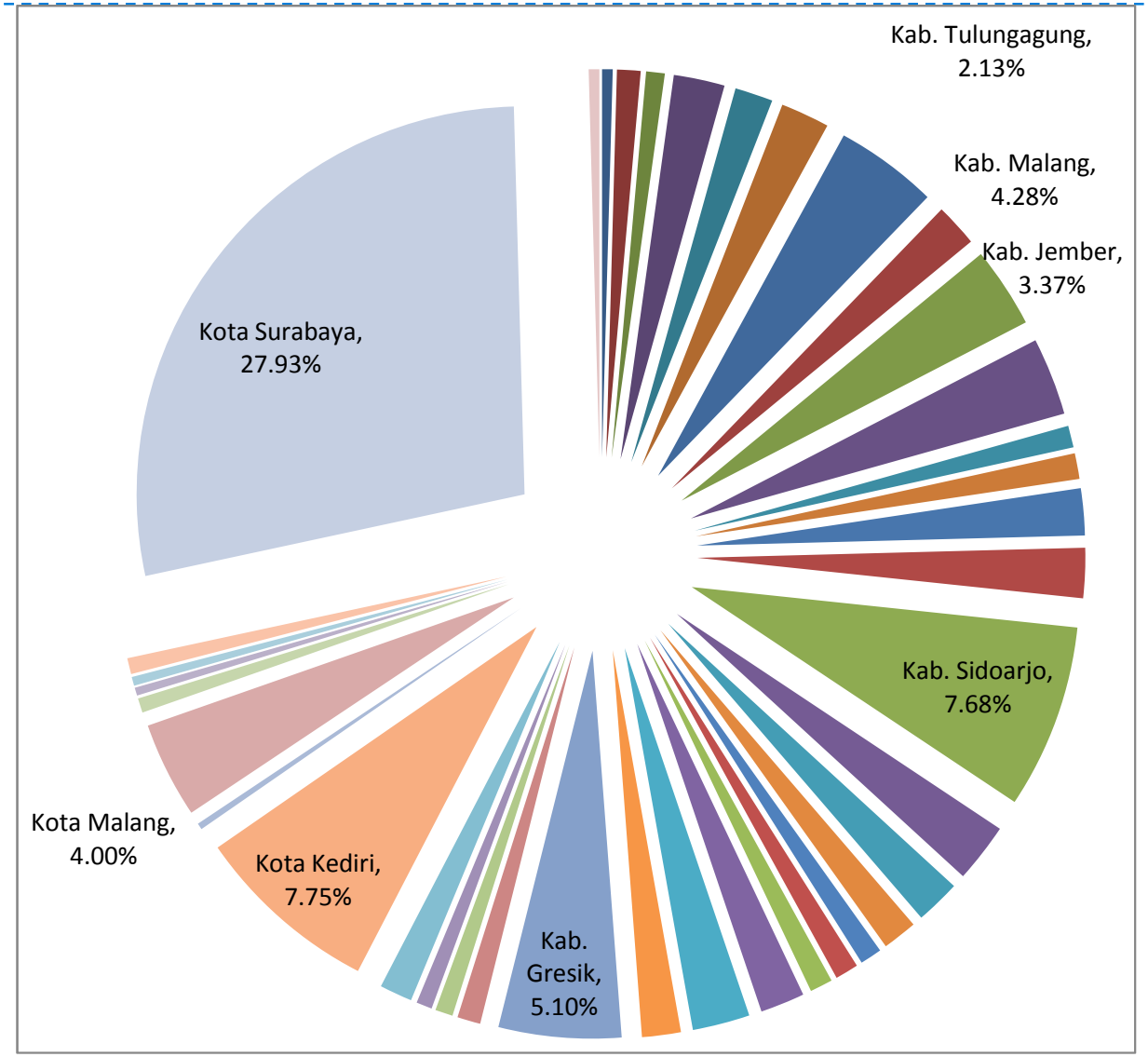

PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR TAHUN 2007-2012

(Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)

Kementerian PPN/ Bappenas

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pacitan	4.321	4.976	5.527	6.189	6.879	7.717	8.809
Ponorogo	5.781	6.656	7.523	8.696	9.781	11.007	12.377
Trenggalek	5.969	6.903	7.721	8.689	9.792	11.044	12.481
Tulungagung	11.482	13.257	14.755	16.424	18.361	20.538	23.109
Blitar	7.836	8.970	9.882	11.001	12.256	13.594	15.235
Kediri	7.520	8.435	9.294	10.408	11.556	12.906	14.566
Malang	9.085	10.391	11.400	12.802	14.432	16.365	18.667
Lumajang	9.742	11.139	12.312	13.770	15.377	17.154	19.269
Jember	7.501	8.784	9.723	10.815	12.065	13.587	15.485
Banyuwangi	10.328	11.899	13.350	14.927	17.099	19.804	22.412
Bondowoso	6.790	7.762	8.519	9.468	10.533	11.801	13.272
Situbondo	9.079	10.344	11.421	12.747	14.203	15.956	17.783
Probolinggo	9.589	10.966	12.093	13.554	15.129	16.898	19.025
Pasuruan	7.243	8.305	9.123	10.273	11.538	12.970	14.646
Sidoarjo	21.670	24.113	26.138	28.984	32.510	36.655	41.094
Mojokerto	12.628	14.413	15.735	17.746	19.979	22.516	25.460
Jombang	8.240	9.508	10.445	11.668	13.147	14.803	16.685
Nganjuk	7.606	8.776	9.688	10.797	12.016	13.499	15.304
Madiun	7.377	8.440	9.246	10.398	11.672	13.122	14.815
Magetan	8.239	9.589	10.597	11.883	13.290	14.891	16.938
Ngawi	6.153	7.056	7.879	8.847	9.887	11.137	12.529
Bojonegoro	9.425	11.397	13.922	18.317	22.677	24.564	26.705
Tuban	11.688	13.655	15.225	16.987	18.961	21.226	24.192
Lamongan	6.757	7.726	8.779	9.972	11.381	12.949	14.844

PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR TAHUN 2007-2012

(Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gresik	21.623	24.805	28.347	32.822	36.842	41.418	46.666
Bangkalan	6.061	6.850	7.432	8.210	9.108	10.240	11.420
Sampang	5.015	5.589	6.046	6.496	7.215	7.965	8.799
Pamekasan	4.547	5.117	5.552	6.157	6.949	7.776	8.675
Sumenep	7.691	8.686	9.584	10.721	12.008	13.408	15.174
Kota Kediri	145.758	167.653	188.705	212.662	240.587	273.327	306.546
Kota Blitar	10.764	12.343	13.697	15.339	17.030	19.026	21.375
Kota Malang	25.858	30.388	33.258	37.464	41.312	46.162	52.093
Kota Probolinggo	15.616	17.881	19.632	21.904	23.928	26.511	29.814
Kota Pasuruan	10.084	11.528	12.636	14.162	15.769	17.399	19.369
Kota Mojokerto	16.285	18.639	20.450	23.205	25.818	28.859	32.158
Kota Madiun	19.901	23.113	25.659	29.166	33.063	37.133	42.085
Kota Surabaya	52.569	59.520	64.760	74.022	84.274	94.213	108.326
Kota Batu	11.734	13.578	15.088	17.063	19.178	21.500	24.638
Jawa Timur	**14.629**	**16.750**	**18.399**	**20.725**	**23.374**	**26.274**	**29,62**

Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa

Kesenjangan antardaerah di Jawa Timur dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan yang cukup tinggi

STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI JAWA TIMUR

Kementerian PPN/ Bappenas

NO.	LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI PERSENTASE (%)	
		2005	2013
1.	PERTANIAN	17,20	14,91
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,07	2,00
3.	**INDUSTRI PENGOLAHAN**	**29,94**	**26,60**
4.	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,50	1,29
5.	KONSTRUKSI	4,22	4,74
6.	**PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN**	**26,45**	**31,34**
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,34	5,94
8.	KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	4,62	5,10
9.	JASA-JASA	8,67	8,09
KONTRIBUSI		**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS

- Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,34%) dan jasa-jasa (26,60%)
- Sementara itu sektor pertanian peranannya menurun dari 17% menjadi 15%
- Sedangkan sektor industri pengolahan dari 29,94% menjadi 26,60%.

PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014

Kementerian PPN/ Bappenas

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)		Perubahan
		(orang)	Orang	%	(orang)
1	**Pertanian**	**8.307.066**	**7.330.701**	**36,86**	**-976.365**
2	Pertambangan	142.016	171.581	0,86	29.565
3	**Industri Pengolahan**	**2.500.781**	**2.844.342**	**14,30**	**343.561**
4	Listrik, Gas, Air	30.574	36.615	0,18	6.041
5	Bangunan	882.806	1.219.168	6,13	336.362
6	**Perdagangan, Hotel, Restoran**	**3.909.487**	**4.332.275**	**21,79**	**422.788**
7	Angkutan & Telekomunikasi	885.385	694.999	3,50	-190.386
8	Keuangan	260.554	423.438	2,13	162.884
9	Jasa-Jasa	2.692.871	2.832.270	14,24	139.399
	Total	**19.611.540**	**19.885.389**	**100,00**	**273.849**

Sumber: BPS

- Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (36,86%), perdagangan, hotel dan restoran (21,79%), dan industri pengolahan (14,30%).
- Selama 4 tahun, pekerja di sektor angkutan & telekomunikasi dan pertanian mengalami penurunan terbanyak masing-masing 21,50% dan 11,75%.

ANGKATAN KERJA
MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	2014%	Perubahan
1	≤ SD	11.391.112	10.597.437	51,15	-793.675
2	SMTP	3.749.766	3.662.839	17,68	-86.927
3	SMTA Umum	3.877.433	4.573.301	22,07	695.868
5	Diploma I/II/III/Akademi	383.483	370.891	1,79	-12.592
6	Universitas	776.796	1.513.306	7,30	736.510
Total		**20.178.590**	**20.717.774**	**100,00**	**539.184**

Sumber: BPS

- Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SD (51,15%)

RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Jawa Timur	306.456	316.425	1,03	0,73
Jawa	2.237.094	1.917.946	0,86	0,52
Nasional	**2.968.535**	**2.774.641**	**0,93**	**0,65**

Sumber: BPS

- Potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah.
- Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Timur adalah bersifat konsumtif.
- Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.
- Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.

KOMPOSISI BELANJA APBD PROVINSI JAWA TIMUR AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

	2008	2009	2010	2011	2012
B. Pegawai	16.404,50	18.888,98	23.784,05	26.859,62	29.737,45
B. Barang Jasa	5.724,42	6.633,11	7.860,00	10.688,64	11.921,09
B. Modal	6.948,64	8.143,60	6.322,31	7.291,59	10.800,99
B. Lain2	4.952,95	4.830,75	6.290,50	6.716,16	5.733,49

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

- Hampir 72% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (51,1%) dan belanja barang jasa (20,5%).
- Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 19%.

KESIMPULAN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (1/4)

- Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan.
- Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi).
- Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (2/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

SOSIAL

- Rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten; Tingginya penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS, dan psikotropika (narkotika); Terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan masyarakat.

- Rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan. Disebabkan belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik; Masih rendahnya kesejahteraan pendidik; Fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara mencukupi dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

- Rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pencari kerja dan belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (3/4)

Kementerian PPN/ Bappenas

LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA

- Berkurangnya sumber mata air DAS Brantas
- Banjir tahunan di PANTURA (DAS Bengawan Solo, Bojonegoro dan sekitarnya)
- Belum terpenuhinya standar air baku akibat pencemaran
- Perusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi berlebihan
- Terbatasnya kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (4/4)

KESENJANGAN WILAYAH

- Wilayah bagian selatan Jawa Timur (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo), serta daerah tapal kuda (Bondowoso, Jember, dan Madura) relatif tertinggal dan memiliki banyak desa tertinggal.

INFRASTRUKTUR

- Penanganan banjir DAS Bengawan Solo dan daerah lainnya yg belum optimal
- Penyelesaian Jalan Lintas Selatan Jatim
- Perluasan Bandara Juanda dan penambahan bandara perintis
- Peningkatan akses ke Pelabuhan Tel. Lamong
- Peningkatan Double Track Kereta utk meningkatkan akses ke pel. Tj Perak, Tj. Tembaga Probolinggo dan Tj. Wangi

REKOMENDASI DAN SARAN

- Pengembangan dunia usaha pertanian melalui pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspors hasil pertanian, dan program pengembangan SDM pertanian
- Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.
- Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.
- Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
- Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor.
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.
- Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik.

PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH

Kementerian PPN/ Bappenas

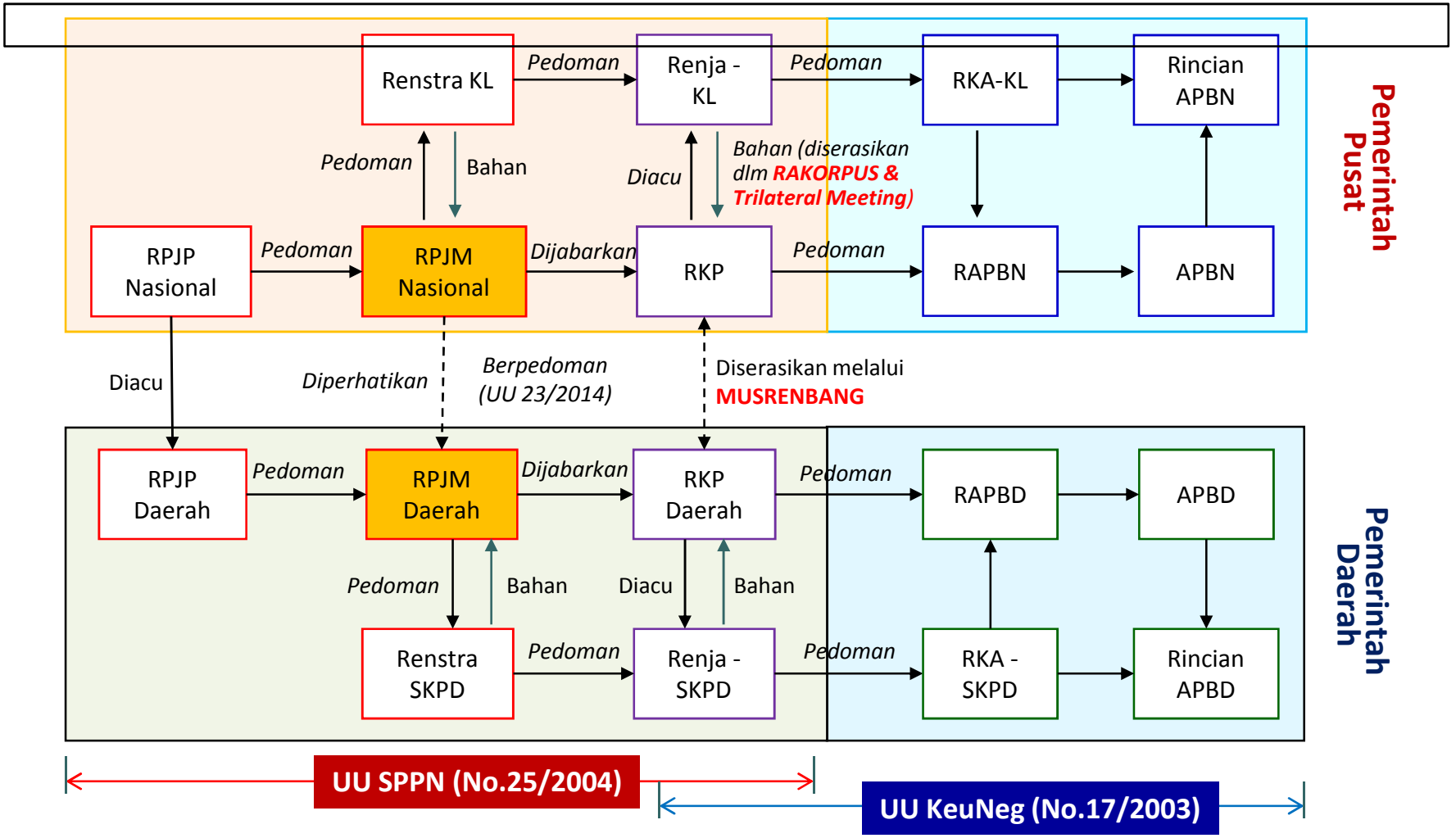

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD

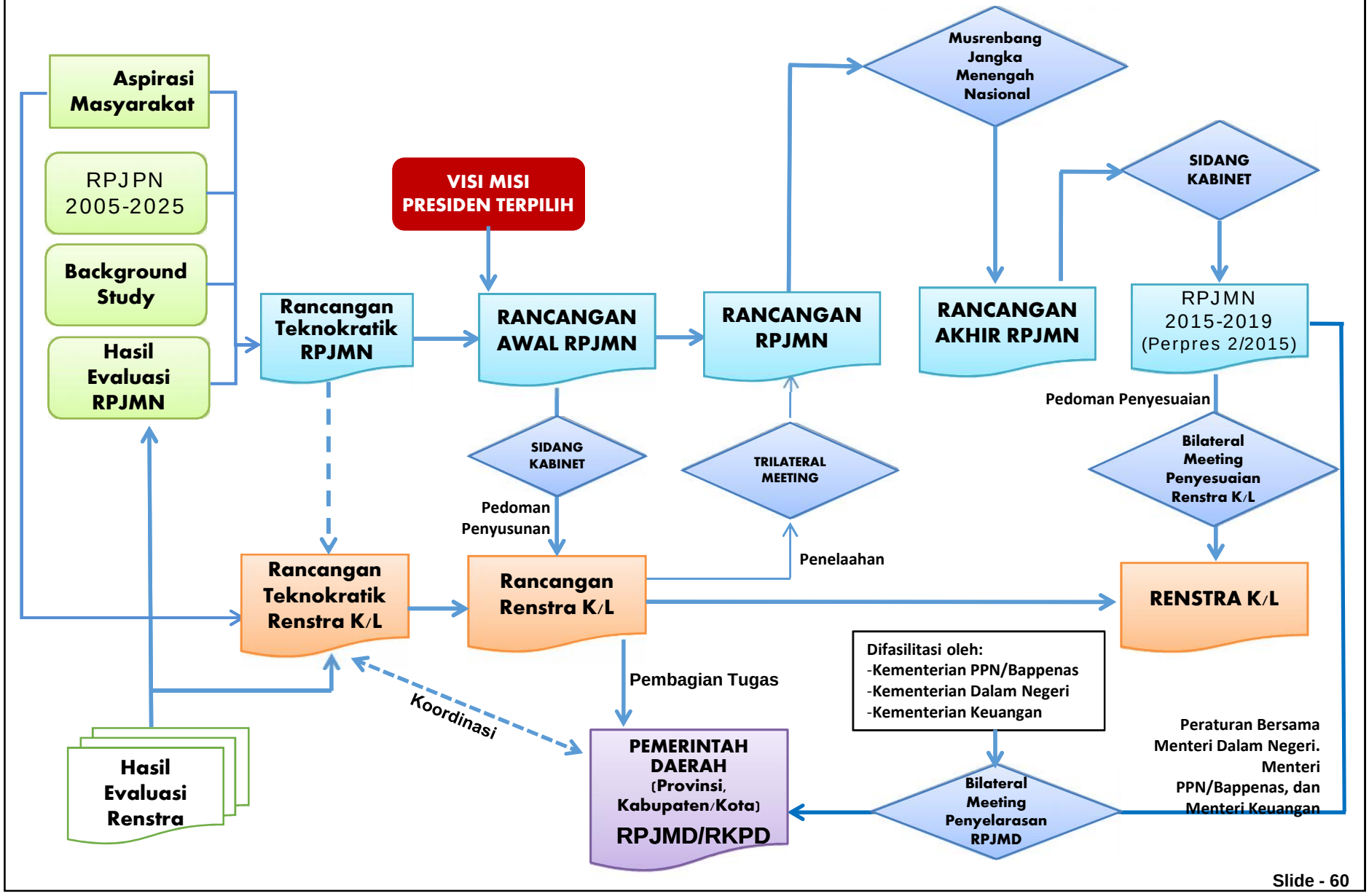

PENYELARASAN
RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019:

- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019.

  i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019.

  ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019.

Kementerian PPN/
Bappenas

Terima Kasih

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kementerian PPN/
Bappenas

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (KESEHATAN)	
Terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan masyarakat	1. RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana-prasarananya yang dilaksanakan di 1 RS yaitu RSUD Dr. Soetomo 2. RS Daerah yang tersertifikasi akreditasi nasional yang akan dilaksanakan di 6 Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Timur yaitu Kota Madiun; Kabupaten Jombang; Kabupaten Jember; Kabupaten Magetan; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Banyuwangi 3. RS Pratama yang dibangun yang direncanakan pembangunan 1 RS Pratama di Kabupaten Pasuruan 4. RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) yang akan dilaksanakan di 5 RS yaitu RSUD Saiful Anwar, Kota Malang; RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik, RSUD Haji Kota Surabaya; RSUD Soedono Madiun, RSUD Soebandi Kab. Jember.

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PEMBANGUNAN PERUMAHAN)	
Persentase kepemilikan rumah sendiri dan rumah kontrak/sewa di Provinsi Jawa Timur selama 10 tahun terakhir cenderung stagnan → Perlu dilakukan **peningkatan penyediaan rumah sewa dan rumah susun di perkotan**, namun masyarakat cenderung masih berorientasi rumah milik dan *landed house* **Jumlah Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni di Jawa Timur sebesar 2,019,030 RT (5,23% dari total RT di Jatim)**	Dilakukan pembangunan perumahan melalui program: **Target 2016 (*)** 1. Pembangunan Rusunawa (4 TB) 2. PSU Perumahan (322 unit) 3. PSU Primer (87 unit) 4. PB Swadaya (5 unit) 5. PSU Swadaya (5 unit) 6. PK PSU Kumuh (14 Ha) 7. PK PSU Swadaya (760 unit) ***)Usulan pembangunan program pembangunan perumahan yang diajukan Prov. Jawa Timur kepada d.h. Kementerian Perumahan Rakyat pada saat Rakonreg Tahun 2014***

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pembangunan Sektor Unggulan (PARIWISATA)	
1. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 2. Peningkatan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadi fokus pemasaran	**Pengembangan Destinasi wisata Bromo – Tengger – Semeru,** melalui pembangunan dalam kawasan: 1. Kebutuhan Air Bersih 2. Jalan Dalam Kawasan 3. Angkutan Umum dalam kawasan 4. Etalase Geopark 5. IT Park & Animation Center 6. Museum & Discovery Center 7. ICT (512 Kbps) 8. Vulcano Simulator 9. Gardu Pandang/Gazebo 10. Tourist Information Center/Layanan Informasi Pariwisata/Info Cuaca 11. Penataan Daya tarik wisata (Visitor Management, interpretasi, diversifikasi produk wisata) 12. Pemberdayaan masyarakat sebagai host dan subjek pembangunan pariwisata 13. Peningkatan kapasitas produk, SDM, dan usaha pariwisata 14. Sentra kreatif dan pusat ekonomi rakyat 15. Promosi pariwisata

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERDAGANGAN	
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan	Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di: 1. Kab. Ponorogo 2. Kab. Jember 3. Kab. Tuban 4. Kota Madiun

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

Kementerian PPN/ Bappenas

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pembangunan Sektor Unggulan (KEDAULATAN PANGAN)	
Salah satu peran penting Jawa Timur bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai lumbung pangan. Produksi padi daerah ini memiliki surplus yang berpotensi mendukung ketahanan pangan wilayah	**1. Pemenuhan target produksi pangan, yaitu:** • **Padi** dengan target **13.180.797 Ton** • **Jagung** dengan target **6.320.862 Ton** • **Kedelai** dengan target **516.911 Ton** **2. Pembangunan jaringan irigasi baru dgn target 2.375 Ha** **3. Rehabilitasi jaringan irigasi dgn target 98.353 Ha** (mencakup jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah dan jaringan tata air tambak**)**
Pembangunan Sektor Unggulan (MARITIM dan KELAUTAN)	
1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; 2. Peningkatan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 3. Peningkatan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 4. peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan	1. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2. Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 3. Pendidikan Kelautan dan Perikanan 4. Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pembangunan Sektor Unggulan (KEDAULATAN ENERGI)	
Realokasi Subsidi BBM ke biofuel dan pengelolaan energi baru dan terbarukan.	1. Realokasi subsidi BBM ke biofuel melalui Pembangunan storage BBN 2. Pembangunan PLTS Terpusat

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH	
Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dimana Jika pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, maka tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih mencapai 12,5 persen.	**Rencana Cakupan Lokasi Wilayah Penghidupan Berkelanjutan (P2B) pada Kecamatan Kantong-Kantong Tahun 2016*, terdiri dari:** 1. Kab. Bangkalan: 4 Kecamatan 2. Kab. Sumenep: 1 Kecamatan 3. Kab. Sampang: 4 Kecamatan 4. Kab. Pamekasan: 1 Kecamatan 5. Kab. Pasuruan: 1 Kecamatan 6. Kab. Ponorogo: 1 Kecamatan 7. Kab. Tuban : 1 Kecamatan 8. Kab. Bondowoso: 1 Kecamatan 9. Kab. Pacitan: 2 Kecamatan 10.Kab. Kediri : 1 Kecamatan 11.Kab. Trenggalek: 1 Kecamatan

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	
Meningkatkan konektivitas di Jawa Timur dengan daerah lain	**A. Perhubungan Laut:** 1. Pengembangan Terminal Mirah 2015-2018 (Car Terminal, Terminal Penumpang, Lap. Penumpukan RoRo, CY, Area Dedicated Curah Cair) 2. Pengadaan Peralatan di terminal Jamrud dan Nilam 2015-2018 (HMC, Fender, CC) 3. Pembangunan Terminal Teluk Lamong (2015-2019): 4. Pembangunan Dermaga Berlian (2015-2018): 5. Pembangunan Terminal Peti Kemas Surabaya (2015-2018) 6. Pembangunan Pelindo Marine Service (PMS) 2015-2018**:** 7. Pengembangan Short Sea Shipping memanfaatkan armada RoRo dan dengan memperkuat pelabuhan RoRo Paciran dan Kendal. **B. Perhubungan Darat:** 1. Pembangunan Jalan Lingkar Probolinggo 2. Pembangunan jalur ganda ka lintas selatan jawa (Madiun-Mojokerto-Wonokromo C. **Perhubungan Udara:** 1. *Pengembangan pelayanan kargo udara bandara Juanda untuk mendukung SISLOGNAS*

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	
Meningkatkan konektivitas di Jawa Timur dengan daerah lain	**A. Perhubungan Laut:** 1. Pengembangan Terminal Mirah 2015-2018 (Car Terminal, Terminal Penumpang, Lap. Penumpukan RoRo, CY, Area Dedicated Curah Cair) 2. Pengadaan Peralatan di terminal Jamrud dan Nilam 2015-2018 (HMC, Fender, CC) 3. Pembangunan Terminal Teluk Lamong (2015-2019): 4. Pembangunan Dermaga Berlian (2015-2018): 5. Pembangunan Terminal Peti Kemas Surabaya (2015-2018) 6. Pembangunan Pelindo Marine Service (PMS) 2015-2018**:** 7. Pengembangan Short Sea Shipping memanfaatkan armada RoRo dan dengan memperkuat pelabuhan RoRo Paciran dan Kendal. **B. Perhubungan Darat:** 1. Pembangunan Jalan Lingkar Probolinggo 2. Pembangunan jalur ganda ka lintas selatan jawa (Madiun-Mojokerto-Wonokromo C. **Perhubungan Udara:** 1. *Pengembangan pelayanan kargo udara bandara Juanda untuk mendukung SISLOGNAS*

PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR BIDANG PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kegiatan	Target
Quickwins :		
1	Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar	
	SD (siswa)	1.346.326
	SMP (siswa)	425.697
	SMA/SMK/SMLB (siswa)**	478.525
	Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan	3
	Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian	5
Program Prioritas Lainnya :		
1	USB SD *	5
2	USB SMP *	101
3	Tunjangan Khusus Guru Dikdas *	30.325
4	BOS SMA/SMLB (siswa)**	509.270
5	BOS SMK (siswa) **	674.753
6	USB SMA**	9
7	USB SMK**	2
8	Tunjangan Khusus Guru Dikmen**	95
9	Pendirian Akademi Komunitas	18
10	Politeknik Negeri Madiun	1
11	Politeknik Negeri Madura	1

Kementerian Agama

No.	Kegiatan	Target
Quickwins :		
1	Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar	
	MI (siswa)	244.056
	MTs (siswa)	234.464
	MA (siswa)	132.386
Program Prioritas Lainnya :		
1	BOP RA (siswa)	280.795
2	BOS MI (siswa)	889.793
3	BOS MTs (siswa)	586.656
4	BOS MA (siswa)	270.141
5	Tunjangan Khusus Guru MadrasahNon-PNS	36
6	Rehab ruang kelas madrasah	112
7	RKB madrasah	181

Keterangan :
* Merupakan target 2015 – 2019
** Merupakan target 2015 yang dipertimbangkan sebagai basis target 2016